



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2018**

GEDUNG DJUANDA I JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 381-2727; FAKSIMILI (021) 381-2727, 345-4319, SITUS www.kemenkeu.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-01/PHPP/2018**

TENTANG

**REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dalam rangka mengisi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2018 mengundang putra dan putri terbaik bangsa di seluruh Indonesia yang ingin mengabdikan kepada negara dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada **Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2018** dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN

UMUM:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 62 (enam puluh dua) tahun per 1 April 2018;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
5. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
6. Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai sekurang-kurangnya 15 tahun;
7. Berwibawa, jujur, adil, berintegritas, dan berkelakuan tidak tercela;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
9. Sehat jasmani dan rohani.

KHUSUS

1. Berpendidikan minimal Sarjana (Strata 1);
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Tertib membayar pajak dibuktikan dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh Perorangan 2 tahun terakhir kepada Direktorat Jenderal Pajak;
4. Tertib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi yang wajib sesuai ketentuan;
5. Memiliki motivasi dan integritas tinggi; dan
6. Bagi Pegawai Negeri Sipil, selain memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

B. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilaksanakan secara *on-line* melalui laman www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id mulai tanggal 23 April s.d. 2 Juni 2018.
2. Pada saat pendaftaran *on-line*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *on-line* serta mengunggah (*upload*) *softfile* berkas berjenis PDF *file* dengan ukuran masing-masing maksimal 5 Mb (*megabyte*) sebagai berikut:
 - a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan menyatakan pilihan untuk menjadi Hakim di bidang pajak atau hakim di bidang kepabeanan dan cukai;

- b. Daftar Riwayat Hidup dengan dibubuhi meterai Rp. 6.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id)
 - c. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna biru ukuran 4x6;
 - d. Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Pasca Sarjana (S2) dan/atau Doktor (S3) yang telah dilegalisir;
 - e. Ijazah/Sertifikat pendidikan keahlian di bidang Perpajakan atau Kepabeanaan dan Cukai (jika ada);
 - f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) setempat;
 - h. Surat Pernyataan tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan dibubuhi meterai Rp. 6.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id);
 - i. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan Tahun 2016 dan 2017;
 - j. Surat Kuasa kepada Panitia untuk mengakses Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan Tahun 2016 dan 2017 dengan dibubuhi meterai Rp. 6.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id);
 - k. Tanda terima/bukti kirim LHKPN/LHKASN terakhir bagi yang wajib.
3. Dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Rekomendasi Pimpinan Unit Eselon I atau pejabat yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif (dapat diunduh di laman www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id); dan
 - b. Surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri;
- harus dibawa pada saat pelaksanaan Tes Pengetahuan Perpajakan dan Penulisan *Paper*.

C. TAHAPAN REKRUTMEN

Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak dilaksanakan dengan tahapan yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Tes Pengetahuan Perpajakan dan Penulisan *Paper*;
3. Tes Kesehatan; dan
4. Wawancara, meliputi pendalaman terhadap hasil *Assessment Center*, penelusuran rekam jejak, serta penerimaan masukan dari masyarakat.

D. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Apabila diketahui pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar selama proses rekrutmen sampai dengan pengangkatan sebagai Hakim Pengadilan Pajak, Panitia Pusat berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai pelamar;
2. Dalam rangka rekrutmen calon Hakim Pengadilan Pajak, Panitia Pusat tidak memungut biaya apapun;
3. Semua keputusan Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Jakarta, 11 April 2018

Sekretaris Jenderal

selaku

Ketua Panitia Pusat,

ttd

Hadiyanto

NIP 196210101987031006

